



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

Pekanbaru, September 2021



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 468 Telp. (0761) 21630, 31631, 21440 Fax. (0761) 32651

P E K A N B A R U

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 188/DLHK-SEKRE/1864

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);



8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 11);
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 74);



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code

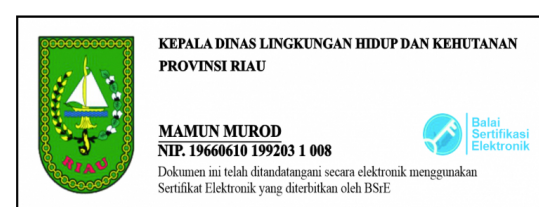
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 52);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 80);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 42).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau Nomor: 050/BAPPEDALITBANG.Bid I/1016 tanggal 9 September 2021 Perihal Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan.
- KEEMPAT** : Sistematisa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 memuat :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 16 September 2021



Catatan

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code

**TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERENGGAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2021**

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Dr. Ir. Mamun Murod, MM, MH 196606101992031008	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2	Iyus Rizal, BSc.F, SP 196401131990031004	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Ketua
3	Wiwik Suryani, S.STP, MSi 198109152000122002	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Sekretaris
4	Alwamen, S.Hut, Msi 197109281992031002	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Ir. H. Setyo Widodo 19660517 199403 1 005	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
6	Embiyarman, S.Hut.T, MP 197211161992121002	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Danang Kabul Sukresno, S.Hut, MT, M.Sc 196603161998031005	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Anggota
8	Pebrian Swanda, S.Hut 197211121998031008	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Anggota
9	Farma Yuniandra, S.Hut, MSi 197406262000031003	Fungsional Perencana Madya	Anggota
10	Yosrizal, S.Hut, MSi 197911061999031004	Fungsional Perencana Muda	Anggota
11	Sri Rahmi, S.Hut 197806082009012002	Fungsional Perencana Muda	Anggota
12	Aliyudin, S.Hut 19741014 200003 1 004	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA dapat disusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2021 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran kegiatan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan maksud mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah khususnya urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau Tahun 2021.

Selanjutnya ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 ini dan akhirnya semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I . PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.7
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	I.7
1.5 Sistematika Penulisan	I.8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021	II.1
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	III.1
3.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	III.1
3.2 Program Dan Kegiatan	III.13
BAB IV PENUTUP	IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021.....	II.1
Tabel	3.1	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021	III.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 tentang perubahan RKPD tahun 2021, maka Perangkat Daerah akan menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pembangunan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yang dalam proses penyusunan mempedomani Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021, maka diperlukan Perubahan Renja Perangkat Daerah sehingga pada akhir pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan kondisi evaluasi laporan realisasi Renja PD Triwulan I dan Triwulan II yang meliputi realisasi capaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pergeseran kegiatan Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Menindaklanjuti Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 dimaksud, maka disusunlah Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 74);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 52);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 80);
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42).
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 75).
31. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 32).
32. Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 36).

33. Keputusan Gubernur Riau Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Riau 2021.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selama tahun 2021.

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2021 dan Surat Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Nomor: 050/BAPPEDALITBANG-Bid/1016 tanggal 9 September 2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan kondisi evaluasi laporan realisasi Renja PD Triwulan I

dan Triwulan II yang meliputi realisasi capaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Pergeseran kegiatan Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.5. Sistematika

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan dengan mempertimbangkan perubahan RKPD Tahun 2021 maka, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pengisian Tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan II tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

REJENYA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021							PEMUTAKHIRAN PEREMDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019						REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD S/D TAHUN 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN						
NO	KODEFKISI	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENJRA PADA TAHUN 2019 - 2024		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA 2021		KODEFKISI	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT-COME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN		I		II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2021 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD S/D TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD S/D TAHUN 2021		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
12.05.01.2.0.04.16.041.				Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja IPT KPH Batu	Jumlah Unit Wilayah Kerja	4 Unit Wilayah Kerja	576.136.000	0	Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250.000.000		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produktif	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250.000.000	0	0	0	116.496.925	0	116.496.925	0,47	0	116.496.925	20,22						
Buku atau Capaian Kinerja (%)																							0,00	0,28								
Profilik Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah								
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH SULAGI BATU GAJAH)																																
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																																
12.05.01.2.0.04.16.			PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Percontaan																		
														Perentase Pemenuhan Sarana Dan Peralatan Administrasi																		
														Perentase Tingkat Kesehatan ASN																		
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %																	
12.05.01.2.0.04.16.026.				Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya IPT KPH Sulagi Batu Gajah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya IPT KPH Sulagi Batu Gajah	60 Bulan	903.271.900	12 Bulan	216.433.020	12 Bulan	203.260.394		Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	8.896.490	0	0	0	0	0	0	0,00	12	216.433.020	20,00	23,96					
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1.459.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													Penyediaan Komponen Listrik/ Peralatan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	140 Porsi/ Box	2.310.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %																	
													Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Surat yang diterima	60 Surat	1.203.510	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	36 OR	148.728.304	2	0	2	45.363.648	4	45.363.648	0	0,33	4	45.363.648	0,00	0	0	0	0	0
													Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Unit	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %																	
													Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Lain	Jumlah kendaraan dinas/peralatan yang dipelihara	1 Unit	28.041.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buku atau Capaian Kinerja (%)																							0,26	0,16								
Profilik Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																																
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																																
12.05.01.2.0.04.16.042.				Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja IPT KPH Sulagi - Batu Gajah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	4 Unit Wilayah Kerja	576.136.000	0	Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250.000.000		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produktif	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Buku atau Capaian Kinerja (%)																							0,00	0,00								
Profilik Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah								
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH KAMPAR KIRI)																																
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																																
12.05.01.2.0.04.16.			PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Percontaan																		
														Perentase Pemenuhan Sarana Dan Peralatan Administrasi																		
														Perentase Tingkat Kesehatan ASN																		
													Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %																	
12.05.01.2.0.04.16.018.				Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya IPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya IPT KPH Kampar Kiri	60 Bulan	1.326.136.000	12 Bulan	167.402.400	12 Bulan	201.430.368		Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	17.744.000	5	0	12	1.000.000	17	1.000.000	1	0,06	23	168.402.400	48,33	12,70				
													Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	10 Jenis	500.000	2	0	8	927.000	10	927.000	1	1,85	10	927.000	0,00	0	0	0	0	
													Penyediaan Komponen Listrik/ Peralatan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	3.590.112	3	0	3	800.000	6	800.000	1	0,22	6	800.000	0,00	0	0	0	0	
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	180 Porsi/ Box	3.600.000	30	0	42	966.000	72	966.000	0	0,27	72	966.000	0,00	0	0	0	0	

Dari tabel Tabel 2.1 yaitu tabel Pencapaian Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

2.1.1. PROGRAM PENDUKUNG (NON URUSAN)

2.1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Dengan target 8 jenis dokumen sudah terealisasi sebanyak 4 jenis dokumen atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 95.805.750,- (40,57%).
2. Administrasi keuangan perangkat daerah.
Dengan target 100% terealisasi sebesar 51,34% dengan anggaran sebesar Rp. 58.754.734.720,- (49,51%).
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.
Dengan target 100% terealisasi sebesar 35,83% dengan anggaran sebesar Rp. 81.490.250,- (28,30%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih proses penyelesaian SPJ dan penyesuaian dengan sistem pencairan keuangan yang baru (non tunai).
4. Administrasi umum perangkat daerah.
Dengan target 100% sudah terealisasi sebesar 42,60% dengan anggaran sebesar Rp. 457.287.425,- (35,20%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih proses penyelesaian SPJ dan penyesuaian dengan sistem pencairan keuangan yang baru (non tunai).
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
Dengan target 100% sudah terealisasi sebesar 47,48% dengan anggaran sebesar Rp. 1.391.873.939,- (37,37%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih

proses penyelesaian SPJ kegiatan dan penyesuaian dengan sistem pencairan keuangan yang baru (non tunai).

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Dengan target 10 unit sudah terealisasi sebanyak 2 unit atau sebesar 20% dengan anggaran sebesar Rp. 29.700.000,- (14,88%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih proses penyelesaian SPJ dan penyesuaian dengan sistem pencairan keuangan yang baru (non tunai).

2.1.2 PROGRAM URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1.2.1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, sebagai berikut:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi

Dengan target 100% baru terealisasi sebesar 8,25% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena proses penyusunan naskah akademik PERDA tentang RPPLH Provinsi Riau masih dalam penyusunan oleh tim ahli dan akan selesai pada Triwulan III untuk dilanjutkan proses pengajuan Ranperda kepada instansi terkait.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi.

Dengan target 7 kabupaten/kota sudah terealisasi sebanyak 1 kabupaten/kota atau sebesar 20,99% dengan anggaran sebesar Rp. 38.101.400,- (8,89%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena adanya rencana perubahan pada rekening honorarium tenaga ahli sehingga akan direalisasikan setelah Perubahan APBD Tahun 2021.

2.1.2.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

1. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dengan target 100% terealisasi sebesar 17,84% dengan anggaran sebesar Rp. 93.698.788,- (4,65%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih proses penyelesaian SPJ dan penyesuaian dengan sistem pencairan keuangan yang baru (non tunai).

2.1.2.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati provinsi.

Dengan target 50 lokasi terealisasi sebanyak 6 lokasi atau sebesar 12% dengan anggaran sebesar Rp. 17.200.000,- (10,33%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2.1.2.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), sebagai berikut :

1. Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Dengan target 12 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 1 lokasi atau sebesar 8,33% dengan anggaran sebesar Rp. 980.000,- (0,87%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan

2.1.2.5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan Ijin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Dengan target 12 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 1 lokasi atau sebesar 8,33% dengan anggaran sebesar Rp. 690.000,- (0,29%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2.1.2.6 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait PPLH, sebagai berikut :

1. Pengakuan MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.

Dengan target 5 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 1 lokasi atau sebesar 20,00% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0,00%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan

2.1.2.7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.

Dengan target 5 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 1 lokasi atau sebesar 20,00% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0,00%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan

2.1.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, sebagai berikut:

1. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi.

Dengan target 10 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 4 lokasi atau sebesar 40,00% dengan anggaran sebesar Rp. 33.320.600,-

(25,03%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2.1.2.9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

1. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) provinsi.

Dengan target 50 kasus terealisasi sebanyak 20 kasus atau sebesar 40,00% dengan anggaran sebesar Rp. 57.835.306,- (34,40%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2.1.2.10 Program Pengelolaan Persampahan, sebagai berikut:

1. Penanganan sampah di TPA/TPST Regional.

Dengan target 100% terealisasi sebesar 31,57% dengan anggaran sebesar Rp. 60.285.750,- (20,77%). Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2.1.3 PROGRAM URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

2.1.3.1 Program Pengelolaan Hutan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi.

Dengan target 150 Ha terealisasi sebesar 30 Ha atau sebesar 33% dengan anggaran sebesar Rp. 44.800.650,- (20,40%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2. Rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
Dengan target 100% terealisasi sebesar 17,39% dengan anggaran sebesar Rp. 8.800.000,- (2,39%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.
3. Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
Dengan target 100% terealisasi sebesar 17,17% dengan anggaran sebesar Rp. 390.465.075,- (6,59%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.
4. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
Dengan target 100% terealisasi sebesar 49,47% dengan anggaran sebesar Rp. 686.393.590,- (41,28%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
Dengan target 12 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 2 kabupaten/kota atau sebesar 16,67% dengan anggaran sebesar Rp. 164.222.300,- (4,44%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan.

2.1.3.2 Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) provinsi.
Dengan target 100% terealisasi sebesar 12% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih proses pelaksanaan paket pekerjaan di lapangan (paket pembuatan fasilitas outbond, gazebo, rehab pos retribusi, rehab musholla dan rehab toilet bumi perkemahan)
2. Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Dengan target 28 Ha terealisasi sebesar 3 Ha atau sebesar 10,71% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena proses persiapan di lapangan dalam penanaman mangrove seluas 28 Ha bersama kelompok masyarakat setempat.

2.1.3.3 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
Dengan target 100% terealisasi sebesar 17,31% dengan anggaran sebesar Rp. 112.555.500,- (6,51%), Pencapaian target fisik belum mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan pelatihan masyarakat dan perjalanan dinas masih belum optimal dilaksanakan

2.1.3.4 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi .
Dengan target 100% terealisasi sebesar 20,50% dengan anggaran sebesar Rp. 20.012.750,- (5,03%), Pencapaian target fisik belum

mencapai 50% disebabkan karena masih diberlakukannya pembatasan sosial akibat pandemi covid 19 sehingga kegiatan perjalanan dinas dan penanaman di lapangan masih belum optimal dilaksanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024 adalah ***“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”***.

Berkaitan dengan misi ke-2 ***“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”*** dan tujuan RPJMD ***“Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (RIAU HIJAU)”***, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai SKPD yang memiliki urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut. Strategi untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dan Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Tujuan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021 adalah:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 bagi setiap bagian dan bidang di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Riau;

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Riau yang termuat dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
3. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Pergeseran dan pengurangan anggaran kegiatan maupun penambahan kegiatan baru pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Perubahan APBD Tahun 2021 dikarenakan alasan tertentu, yaitu :

1. Adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi Covid 19
2. Pentingnya penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Pengelolaan Hutan Provinsi Riau.
3. Adanya tambahan anggaran yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kehutanan dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang merupakan SILPA kegiatan sejak tahun 2018 s.d 2020.

Pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran ataupun perubahan diantaranya:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 209,098,404,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 236,162,404,-.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 113,793,901,882,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 118,668,341,360,-.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 268,113,385,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 287,999,385,-.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 1,532,783,122,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,343,243,152,-.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 3,690,138,586,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 3,732,332,986,-.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 210,048,218,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 150,000,000,-.
7. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 392,984,263,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 734,998,488,-.
8. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 407,669,345,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 428,753,345,-.
9. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pagu anggaran sebesar Rp. 1,573,634,750,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,077,846,640,-.
10. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 112,675,300,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 184,438,875,-.

11. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 54,640,110,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 125,179,635,-.
12. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 98,232,715,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 260,830,373,-.
13. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, pagu anggaran sebesar Rp. 84,834,127,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 144,049,887,-.
14. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 128,950,053,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 430,791,459,-.
15. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 109,339,795,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 143,549,795,-.
16. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 215,895,640,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 188,074,640,-.
17. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, pagu anggaran sebesar Rp. 228,105,155,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 318,219,440,-.
18. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp.

165,919,831,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 240,833,536,-.

19. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), pagu anggaran sebesar Rp. 746,499,235,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 393,299,065,-.
20. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, pagu anggaran sebesar Rp. 439,331,499,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 614,969,489,-.
21. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, pagu anggaran sebesar Rp. 542,480,269,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 297,052,023,-.
22. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pagu anggaran sebesar Rp. 3,016,886,035,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 690,128,505,-.
23. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pagu anggaran sebesar Rp. 467,600,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
24. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pagu anggaran sebesar Rp. 304,145,510,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 283,214,510,-.
25. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp. 381,331,557,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 416,019,867,-.
26. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di UPT Laboratorium Lingkungan, pagu anggaran

sebesar Rp. 788,761,728,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 999,999,728,-.

27. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, pagu anggaran sebesar Rp. 224,060,872,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
28. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat, pagu anggaran sebesar Rp. 389,619,690,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 483,484,997,-.
29. Administrasi Umum Perangkat Daerah di UPT Perbenihan Tanaman Hutan, pagu anggaran sebesar Rp. 37,093,652,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 39,680,652,-.
30. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara UPT Perbenihan Tanaman Hutan, pagu anggaran sebesar Rp. 2,657,922,496,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,359,029,496,-.
31. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Minas TAHURA, pagu anggaran sebesar Rp. 210,672,400,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 233,025,802,-.
32. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Minas TAHURA, pagu anggaran sebesar Rp. 623,570,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
33. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Minas TAHURA, pagu anggaran

sebesar Rp. 3,189,724,846,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,930,629,755,-.

34. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-Api, pagu anggaran sebesar Rp. 92,261,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
35. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-Api, pagu anggaran sebesar Rp. 167,366,075,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 182,139,770,-.
36. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-Api, pagu anggaran sebesar Rp. 760,766,500,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
37. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis, pagu anggaran sebesar Rp. 106,455,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
38. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis, pagu anggaran sebesar Rp. 125,344,812,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 224,158,679,-.
39. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis, pagu anggaran sebesar Rp. 626,455,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
40. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis, pagu anggaran sebesar

Rp. 100,000,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

41. Administrasi Umum Perangkat Daerah di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau, pagu anggaran sebesar Rp. 105,581,390,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 107,042,640,-.
42. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau, pagu anggaran sebesar Rp. 996,272,473,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,174,813,253,-.
43. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau, pagu anggaran sebesar Rp. 622,974,200,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
44. Administrasi Umum Perangkat Daerah di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, pagu anggaran sebesar Rp. 72,686,913,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 94,032,913,-.
45. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, pagu anggaran sebesar Rp. 979,628,703,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,221,465,904,-.
46. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, pagu anggaran sebesar Rp. 626,681,450,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
47. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, pagu anggaran sebesar

- Rp. 150,000,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
48. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan, pagu anggaran sebesar Rp. 236,296,750,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
 49. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi Batu, pagu anggaran sebesar Rp. 193,940,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
 50. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi Batu, pagu anggaran sebesar Rp. 178,766,915,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 230,449,600,-.
 51. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi Batu, pagu anggaran sebesar Rp. 570,970,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
 52. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi Batu, pagu anggaran sebesar Rp. 100,000,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
 53. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi Batu, pagu anggaran sebesar Rp. 236,296,750,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

54. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri, pagu anggaran sebesar Rp. 173,540,643,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 230,227,203,-.
55. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri, pagu anggaran sebesar Rp. 596,519,200,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
56. Administrasi Umum Perangkat Daerah di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek pagu anggaran sebesar Rp. 62,882,455,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 77,978,455,-.
57. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek pagu anggaran sebesar Rp. 144,387,970,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 175,629,915,-.
58. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek pagu anggaran sebesar Rp. 599,358,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
59. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Sekap pagu anggaran sebesar Rp. 1,116,689,971,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 1,224,439,709,-.
60. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar, pagu anggaran sebesar Rp. 627,746,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
61. Administrasi Umum Perangkat Daerah di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp.

81,960,911,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 99,138,911,-.

62. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp. 96,519,200,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

63. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp. 171,232,500,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 225,225,000,-.

64. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp. 670,328,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

65. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp. 1,202,058,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

66. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi, pagu anggaran sebesar Rp. 150,000,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

67. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah pagu anggaran sebesar Rp. 141,940,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.

68. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah pagu anggaran sebesar Rp. 134,460,239,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 227,000,011,-.
69. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah pagu anggaran sebesar Rp. 763,439,598,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
70. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah pagu anggaran sebesar Rp. 300,000,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 0,-.
71. Administrasi Umum Perangkat Daerah di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri pagu anggaran sebesar Rp. 71,517,595,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp. 95,569,595,-.
72. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri pagu anggaran sebesar Rp. 136,317,637,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp 181,459,793,-.
73. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri pagu anggaran sebesar Rp. 808,201,700,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp 0,-.
74. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi pagu anggaran sebesar Rp. 197,989,200,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp 0,-.

75. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi pagu anggaran sebesar Rp. 113,111,063,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp 180,724,887,-.
76. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi pagu anggaran sebesar Rp. 570,820,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp 0,-.
77. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan di UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi pagu anggaran sebesar Rp. 200,000,000,- bergeser dari pagu anggaran sebelumnya yakni Rp 0,-.

3.2 Program Dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja). Pada dokumen Perubahan Renja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk tercapainya tujuan dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berikut faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berkaitan dengan pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 dalam aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terdiri dari:

1. Penyesuaian terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Menghindari pelaksanaan pembangunan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi;
3. Identifikasi program/kegiatan strategis daerah (pencegahan dan penanggulangan karhutla, pariwisata berbasis budaya, peningkatan produktifitas pertanian, dll).

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebesar Rp 123.111.044.850,- bergeser dari pagu Anggaran sebelumnya yakni Rp 128.454.811.864,- dengan prakiraan maju pada tahun 2022 sebesar Rp. 143.185.087.869,-

Untuk APBD Perubahan Tahun 2021 terdapat 15 Program dan 25 Kegiatan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
2. Program perencanaan lingkungan hidup
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
5. Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
10. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
11. Program pengelolaan persampahan
12. Program pengelolaan hutan
13. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
14. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
15. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Adapun rincian perubahan rencana kegiatan per program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2	1 1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	128,454,811,864	123,111,044,850		143,185,087,869	
2	1 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	124,418,079,287	119,704,083,597		136,481,151,269	
2	1 1	0 1	1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	236,162,404	209,098,404		241,582,488
2	1 1	0 1	1.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Jenis Dokumen	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	100 Persen	236,162,404	209,098,404	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	241,582,488				
2	1 1	0 1	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	118,668,341,360	113,793,901,882		130,000,000,000
2	1 1	0 1	1.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kehadiran ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	845 orang	845 orang	845 Orang	845 Orang	118,668,341,360	113,793,901,882	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat kehadiran ASN	100 Persen	130,000,000,000					
2	1 1	0 1	1.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	287,999,385	268,113,385		402,500,000
2	1 1	0 1	1.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 %	100 Persen	287,999,385	268,113,385	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	402,500,000					
2	1 1	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	1,343,243,152	1,532,783,122		1,660,368,781
2	1 1	0 1	1.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	29,992,785	29,992,785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	34,500,000					
2	1 1	0 1	1.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	41 Unit	45 Unit	100 %	100 Persen	416,090,847	478,096,642	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	416,096,381					

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2101064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10000 Porsi/Box	9600 Porsi/Box	100 %	100 Persen	256,670,000	170,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	316,247,700	
2101065	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Jenis	12 Jenis	100 %	100 Persen	71,897,520	71,897,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	87,227,500	
2101069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	75 Kali	100 Kali	100 %	100 Persen	568,592,000	782,526,175	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	806,297,200	
210108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												3,732,332,986	3,690,138,586			4,061,700,000	
2101081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	149 Surat	149 Surat	100 %	100 Persen	7,580,000	7,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	9,200,000	
2101082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening yang dibayar	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	26 Rekening	26 Rekening	100 %	100 Persen	1,209,254,008	1,209,254,008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,380,000,000	
2101083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	291 Unit	301 Unit	100 %	100 Persen	149,930,000	164,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	172,500,000	
2101084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	50 OB	600 OB	100 %	100 Persen	2,365,568,978	2,308,374,578	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,500,000,000	
210109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												150,000,000	210,048,218			115,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210101	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10 Unit	10 Unit	100 %	100 Persen	150,000,000	210,048,218	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	115,000,000	
2102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												1,163,751,833	800,653,608			1,655,594,700	
21021	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi												734,998,488	392,984,263			862,500,000	
210211	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	Persentase tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	649,999,518	312,284,843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	747,500,000	
210212	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	Persentase tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	84,998,970	80,699,420	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	115,000,000	
21022	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi												428,753,345	407,669,345			793,094,700	
210221	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah asistensi validasi KLHS Kab/Kota	Persentase tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Kab/ Kota	4 Kab/ Kota	12 kab/Kota	100 Persen	155,399,395	155,399,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	493,094,700	
210222	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah asistensi validasi KLHS Kab/Kota	Persentase tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	12 kab/Kota	100 Persen	273,353,950	252,269,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	300,000,000	
2103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												1,077,846,640	1,573,634,750			2,778,987,900	
21031	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												1,077,846,640	1,573,634,750			2,778,987,900	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210101	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Unit	Tercapainya Persentase penyusunan dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dan dokumen pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.02 Persen	4 Dokumen	4 Unit	4 Dokumen	100 Persen	854,862,815	1,411,030,545	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0.02 Persen	1,462,737,900	
210102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Dokumen	Tercapainya Persentase penyusunan dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dan dokumen pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.02 Persen	7 Lokasi	1 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	222,983,825	162,604,205	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0.02 Persen	316,250,000	
210103	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Tercapainya Persentase penyusunan dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dan dokumen pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.02 Persen	90 Unit	90 Unit	4 Dokumen	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0.02 Persen	1,000,000,000	
2104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												184,438,875	112,675,300			126,152,700	
21041	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi												184,438,875	112,675,300			126,152,700	
21041	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keaneekaragaman hayati di Provinsi Riau	Persentase penyediaan Dokumen Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,77 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Lokasi	100 Persen	112,669,505	64,637,730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	11,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21010102	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah Dokumen	Persentase penyediaan Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,77 Persen	1 Lokasi	1 Dokumen	10 Lokasi	100 Persen	71,769,370	48,037,570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	34,500,000	
21010104	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah lokasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyediaan Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0,77 Persen	0 Lokasi	0 Lokasi	10 Lokasi	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	11,500,000	
21010105	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Persentase penyediaan Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0,77 Persen	0 Lokasi	0 Lokasi	10 Lokasi	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	17,250,000	
21010106	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase penyediaan Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0,77 Persen	0 Lokasi	0 Lokasi	10 Lokasi	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	17,250,000	
21010107	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Persentase penyediaan Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0,77 Persen	0 Lokasi	0 Lokasi	10 Lokasi	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	34,152,700	
210105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												125,179,635	54,640,110			172,500,000	
2101051	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												125,179,635	54,640,110			172,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210101	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Kab/ Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan fasilitasi dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Kab/ Kota	8 Kab/ Kota	12 Kab/Kota	100 Persen	95,299,865	54,640,110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	127,990,170	
210102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Dokumen	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan fasilitasi dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	3 Kali	0 Dokumen	12 Kab/Kota	100 Persen	29,879,770	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	44,509,830	
2106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											260,830,373	98,232,715			344,956,300		
21061	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi											260,830,373	98,232,715			344,956,300		
21061	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten/kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Lokasi	8 Lokasi	12 kab/Kota	100 Persen	119,097,025	67,970,475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	172,500,000	
21061	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah pejabat pengawas LH yang dilakukan pengembangan kapasitas	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	4 Orang	0 Orang	12 kab/Kota	100 Persen	18,351,672	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	23,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
210103	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	17 Usaha/Kegiatan	1 Usaha/Kegiatan	12 kab/Kota	100 Persen	95,731,936	8,032,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	114,956,300	
210104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Kab/ Kota	7 Kab/ Kota	12 kab/Kota	100 Persen	27,649,740	22,229,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	34,500,000	
2107	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												144,049,887	84,834,127			207,000,000	
21071	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH												144,049,887	84,834,127			207,000,000	
21071	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	Persentase Kab/Kota yang dibina kearifan lokalnya (penghargaan lingkungan hidup)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.02 Persen	7 Kab/ Kota	5 Kab/ Kota	7 Kab/Kota	40 Persen	144,049,887	84,834,127	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0.02 Persen	207,000,000	
2108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												430,791,459	128,950,053			386,250,000	
21081	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi												430,791,459	128,950,053			386,250,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
21010102	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	Persentase Kab/Kota yang dibina tentang pendidikan lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,77 Persen	6 Kelompok Masyarakat	5 Kab/Kota	12 Kab/ Kota	40 Persen	181,147,439	128,950,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	86,250,000	
21010103	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Persentase Kab/Kota yang dibina tentang pendidikan lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,77 Persen	2 Kali	0 Kali	12 Kab/ Kota	40 Persen	249,644,020	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	0,77 Persen	300,000,000	
210101	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												143,549,795	109,339,795			392,495,000	
210101	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi												143,549,795	109,339,795			392,495,000	
210101	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	Persentase penilaian Adipura dan Sekolah Adiwiyata di Kab/Kota Persentase penilaian Adipura dan Sekolah Adiwiyata di Kab/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota 12 Kab/ Kota	80 Persen 80 Persen	143,549,795	109,339,795	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	392,495,000	
210101	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												188,074,640	215,895,640			230,000,000	
210101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi												188,074,640	215,895,640			230,000,000	
210101	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi yang diselesaikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	50 Kasus	50 Kasus	50 Kasus	100 Persen	188,074,640	215,895,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	230,000,000	
210101	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												318,219,440	228,105,155			410,000,000	
210101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional												318,219,440	228,105,155			410,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
211101	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan dan penanganan sampah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	Persentase Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0,02 Persen	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	100 Persen	229,739,765	177,168,120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	180,000,000	
211103	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		0,02 Persen	0 Unit	0 Unit	12 Kab/ Kota	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	115,000,000		
211105	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Dokumen	Persentase Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,02 Persen	12 Kab/ Kota	1 Dokumen	12 Kab/ Kota	100 Persen	88,479,675	50,937,035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	57,500,000		
211106	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah Kab/kota yang dilakukan kerjasama penanganan sampah	Persentase Tersusunnya Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		0,02 Persen	0 Kab/ Kota	0 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0,02 Persen	57,500,000		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN												2,935,516,995	6,064,193,936		5,573,899,923		
3283	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												2,236,282,618	4,911,116,869		3,729,419,523		
32831	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												240,833,536	165,919,831		287,500,000		
328314	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Luas Hutan Yang Teridentifikasi Dan Terselesaikan Dari Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Persentase Identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha	1 Dokumen/ Sistem	150 Ha	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	240,833,536	165,919,831	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000		
32832	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)												393,299,065	746,499,235		746,499,235		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan KPH	Persentase Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	393,299,065	746,499,235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	746,499,235	
320103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												614,969,489	439,331,499			754,250,000	
320103	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah laporan	Persentase tersedianya data PNPB Provinsi Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	13 Laporan	13 Laporan	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	240,969,780	173,081,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	300,000,000	
320103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah dokumen Rekonsiliasi PNPB Sektor kehutanan	Persentase tersedianya data PNPB Provinsi Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	373,999,709	266,249,709	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	454,250,000	
320103	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												297,052,023	542,480,269			1,061,420,288	
320103	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Hutan Hak/Rakyat	Persentase terbinanya kegiatan di bidang kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	10 Unit	4 Unit		100 Persen	93,999,981	106,059,981	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	125,000,000	
320103	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase terbinanya kegiatan di bidang kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	10 Ha	0 Ha		100 Persen	203,052,042	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	500,000,000	
320103	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah laporan	Persentase terbinanya kegiatan di bidang kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 Laporan		100 Persen	0	436,420,288	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan - Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	436,420,288	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3201035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												690,128,505	3,016,886,035				879,750,000
32010352	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Riau Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	12 Kali	2 Kasus	140 Ha 2 Kasus	100 Persen 100 Persen	449,759,955	331,981,955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	575,000,000	
32010355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Riau Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	12 Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	140 Ha 2 Kasus	100 Persen 100 Persen	240,368,550	2,684,904,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	304,750,000	
3201034	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA										0	467,600,000			0			
3201033	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam										0	467,600,000			0			
32010344	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Tertanamnya Kawasan Mangrove	Luasan penanaman/pemeliharaan	Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kelurahan		700000 Ha		28 Ha		28 Ha	0	467,600,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
3201035	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										283,214,510	304,145,510			801,775,400			
32010351	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan										283,214,510	304,145,510			801,775,400			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320102	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/ Hkm/Desa	Persentase terlaksananya Perhutanan Sosial dan Penyuluhan Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	3 Lokasi	12 Lokasi	2 Kelompok Tani	100 Persen	116,944,935	166,362,935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	212,750,000	
320103	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi masyarakat	Persentase terlaksananya Perhutanan Sosial dan Penyuluhan Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	20 Izin/ Pokmas	24 Izin	2 Kelompok Tani	100 Persen	166,269,575	137,782,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	589,025,400	
3206	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												416,019,867	381,331,557			1,042,705,000	
32061	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												416,019,867	381,331,557			1,042,705,000	
320611	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Persentase penurunan luasan lahan kritis	Jumlah dokumen	Luas Rehabilitasi wilayah DAS/ Mangrove	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	10 Ha	16 Ha	119,820,520	114,745,520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penurunan luasan lahan kritis	1 Persen	143,750,000	
320612	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Persentase penurunan luasan lahan kritis	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	Luas Rehabilitasi wilayah DAS/ Mangrove	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Persen	20 Ha	16 Ha	10 Ha	16 Ha	296,199,347	266,586,037	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penurunan luasan lahan kritis	1 Persen	898,955,000	
TOTAL													131,390,328,859	129,175,238,786			294,132,533,102	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	1 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													1,141,303,623	922,775,623			2,287,461,800	
2	1 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													141,303,895	134,013,895			137,461,800	
2	1 1	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah													42,286,638	34,996,638			31,958,500	
2	1 1	0 1	1.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	2,999,053	2,999,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,450,000
2	1 1	0 1	1.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Jumlah meubeleur yang diadakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	32 Jenis 8 Unit	32 Jenis 8 Unit	100 %	100 Persen	23,081,747	23,081,747	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	8,625,000	
2	1 1	0 1	1.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	104 Porsi	104 Porsi	100 %	100 Persen	4,176,000	4,176,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,750,000	
2	1 1	0 1	1.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Jenis	5 Jenis	100 %	100 Persen	4,739,838	4,739,838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,750,000	
2	1 1	0 1	1.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13 Kali	0 Kali	100 %	100 Persen	7,290,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	8,383,500	
2	1 1	0 1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													49,457,257	49,457,257			91,703,300
2	1 1	0 1	1.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 Surat	150 Surat	100 %	100 Persen	1,320,000	1,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,450,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2101083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	17 Unit	100 %	100 Persen	11,690,000	11,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,750,000	
2101084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	24 OB	24 OB	100 %	100 Persen	36,447,257	36,447,257	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	82,503,300	
210109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												49,560,000	49,560,000			13,800,000	
2101091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 Persen	49,560,000	49,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	13,800,000	
21013	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												999,999,728	788,761,728			1,000,000,000	
210131	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												999,999,728	788,761,728			1,000,000,000	
2101313	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase Peningkatan Kualitas Air	Jumlah sarana prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.02 Persen	90 Unit	1 Unit		100 Persen	999,999,728	788,761,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Kualitas Air	0.02 Persen	1,000,000,000	
21014	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												0	0			1,150,000,000	
210141	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi												0	0			1,150,000,000	
2101417	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	terverifikasinya lokasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem di areal izin usaha/kegiatan				90 Unit	90 Unit	10 Lokasi	10 Lokasi	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,150,000,000	
TOTAL												1,141,303,623	922,775,623			3,609,998,600		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														666,738,792	796,934,357		718,928,872				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														183,253,795	183,253,795		149,868,000			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														59,267,779	59,267,779		60,631,450		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	845,250	
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Unit	3 Unit	100 %	100 Persen	32,742,181	32,742,181	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	26,450,000	
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	107 Porsi	250 Porsi	100 %	100 Persen	3,528,000	3,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,692,000	
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	6 Jenis	2 Jenis	100 %	100 Persen	2,999,998	2,999,998	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,658,800	
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	5 Kali	1 Kali	100 %	100 Persen	18,997,600	18,997,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	25,985,400	
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														86,676,016	86,676,016		55,944,050
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	60 Surat	60 Surat	100 %	100 Persen	1,300,000	1,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT. PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
38183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	15 Unit	100 %	100 Persen	7,920,000	7,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,025,000	
38184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	24 OB	100 %	100 Persen	77,456,016	77,456,016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	50,769,050	
3819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												37,310,000	37,310,000			33,292,500	
38191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	3 Unit	100 %	100 Persen	37,310,000	37,310,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	33,292,500	
383	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												0	224,060,872			224,060,872	
3835	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	224,060,872			224,060,872	
38355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah orang	Persentase terlaksananya Pelatihan Pokmas/ KTH/ Masyarakat Sekitar Hutan/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		80 Orang		100 Persen	0	224,060,872	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	224,060,872	
385	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												483,484,997	389,619,690			345,000,000	
3851	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												483,484,997	389,619,690			345,000,000	
38512	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Kelompok Tani	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/ pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	2 Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	100 Persen	483,484,997	389,619,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	345,000,000	
TOTAL													666,738,792	796,934,357			1,276,678,872	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														1,542,036,324	2,838,342,324		3,897,791,608				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														183,006,828	180,419,828		232,469,112			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														39,680,652	37,093,652		52,984,974		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	1,792,643	1,792,643	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,000,023	
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	26 Jenis	26 Unit	100 %	100 Persen	6,022,561	6,022,561	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	7,535,236		
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 porsi/box	100 porsi/box	100 %	100 Persen	2,400,000	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,000,000		
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 Persen	3,595,448	3,595,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,152,109		
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kali	5 Kali	100 %	100 Persen	25,870,000	23,283,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	33,297,606		
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														101,316,176	101,316,176		103,484,073
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Surat	60 Surat	100 %	100 Persen	960,000	960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	990,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT. PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
38183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	10 Unit	100 %	100 Persen	2,390,000	2,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,768,073	
38184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	60 OB	100 %	100 Persen	97,966,176	97,966,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	99,726,000	
3819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												42,010,000	42,010,000			76,000,065	
38191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	100 Porsi	2 Unit	100 %	100 Persen	42,010,000	42,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	76,000,065	
383	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												1,359,029,496	2,657,922,496			3,665,322,496	
3834	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												1,359,029,496	2,657,922,496			2,657,922,496	
38346	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Bibit	Persentase tersedianya bibit untuk penghijauan di Provinsi Riau	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	55.311 Bibit	120311 Bibit		100 Persen	1,359,029,496	2,657,922,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	2,657,922,496	
3839	Perbenihan Tanaman Hutan												0	0			1,007,400,000	
38391	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar		Jumlah bibit yang dibuat	Penurunan Luasan Lahan Kritis				55211 Bibit	55211 Bibit	140 Ha	140 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,007,400,000	
TOTAL													1,542,036,324	2,838,342,324			5,117,941,608	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														2,665,745,077	4,526,056,766		1,987,059,185				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														502,089,520	502,089,520		730,989,185			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														24,462,064	24,462,064		99,175,094		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	1,950,000	1,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	58,387,800	
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Jenis	17 Unit	100 %	100 Persen	13,826,280	13,826,280		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	19,079,635		
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Porsi	71 Porsi/Box	100 %	100 Persen	1,775,000	1,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,800,009		
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 Persen	220,784	220,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	254,150		
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Kali	2 Kali	100 %	100 Persen	6,690,000	6,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	19,653,500		
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														411,907,456	411,907,456		556,295,241
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Surat	150 Surat	100 %	100 Persen	1,150,000	1,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,384,036		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3201082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening yang dibayar	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 rekening	12 Bulan	100 %	100 Persen	35,918,640	35,918,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	40,000,000	
3201083	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Unit	18 Unit	100 %	100 Persen	13,860,000	13,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	16,500,005	
3201084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	192 OB	100 %	100 Persen	360,978,816	360,978,816	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	498,411,200	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												65,720,000	65,720,000			75,518,850	
3201091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	9 Unit	100 %	100 Persen	65,720,000	65,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	75,518,850	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												233,025,802	834,242,400			911,070,000	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												233,025,802	210,672,400			287,500,000	
320331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	233,025,802	210,672,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000	
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	623,570,000			623,570,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3203505	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPHP Minas Tahura	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		9 Lokasi		100 Persen	0	623,570,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	623,570,000	
3204	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												1,930,629,755	3,189,724,846		345,000,000		
32041	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi												1,930,629,755	3,189,724,846		345,000,000		
320415	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Luasan (Ha)	Persentase terkelolanya Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		85 Hektar	1 Lokasi	100 Persen	0	1,424,920,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
320416	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahura SSH	Persentase terkelolanya Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100 Persen	1,930,629,755	1,764,804,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	345,000,000	
TOTAL													2,665,745,077	4,526,056,766		3,194,559,184		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	2 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														413,421,096	1,251,674,901		1,507,788,400		
3	2 8	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														231,281,326	231,281,326		274,760,900		
3	2 8	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														124,879,008	124,879,008		157,924,900	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	1,180,000	1,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,380,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	2 Unit	2 Unit	100 %	100 Persen	29,208,298	29,208,298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	26,753,600	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	21 Porsi	21 Porsi	100 %	100 Persen	990,000	990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 Persen	999,710	999,710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10 Kali	9 Kali	100 %	100 Persen	92,501,000	92,501,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	127,491,300	
3	2 8	0 1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														96,902,318	96,902,318		105,773,000
3	2 8	0 1	1.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	110 Surat	124 Surat	100 %	100 Persen	1,500,000	1,500,000		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,725,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	12 Bulan	3 Unit	100 %	100 Persen	1,779,470	1,779,470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,070,000		
320104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	48 OB	100 %	100 Persen	93,622,848	93,622,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	101,978,000		
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										9,500,000	9,500,000				11,063,000		
320109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	7 Unit	100 %	100 Persen	9,500,000	9,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	11,063,000		
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										182,139,770	1,020,393,575				1,233,027,500		
32031	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi										0	92,261,000				92,261,000		
32031	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Dokumen RPHJP	Persentase tersedianya dokumen RPHJP pada UPT KPH	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha		1 Dokumen		100 Persen	0	92,261,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	92,261,000		
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										182,139,770	167,366,075				230,000,000		
32033	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	182,139,770	167,366,075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	230,000,000		
32034	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara										0	0				150,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPI-API

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 8 3 4 6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah batang	Persentase tersedianya bibit untuk penghijauan di UPT KPH Bagan Siapi-API	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		20000 Batang		100 Persen		0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	150,000,000
3 2 8 3 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	760,766,500			760,766,500	
3 2 8 3 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Bagan Siapi-API	Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		4 Lokasi		100 Persen		0	760,766,500	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	760,766,500
TOTAL													413,421,096	1,251,674,901			2,025,288,400	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3201069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10 kali	10 kali				100 Persen	43,360,000	43,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	60,000,000
32017	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0				4,136,354		
320171	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah meubeleur yang diadakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum				8 Unit	8 Unit	100 %	100 %		0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4,136,354
32018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												157,580,378	157,580,378				55,506,588		
320181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	110 Surat	150 Surat				100 Persen	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,725,000
320183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	4 Unit				100 Persen	28,543,221	28,543,221	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,495,000
320184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	36 OB				100 Persen	127,537,157	127,537,157	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	52,286,588
32019	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												8,040,976	8,040,976				20,900,000		
320191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 unit	1 unit	100 %	100 Persen		100 Persen	8,040,976	8,040,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	14,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3201002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum			100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 Persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	6,900,000	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												224,158,679	858,254,812		1,020,410,000		
32031	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												0	106,455,000		106,455,000		
320313	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah unit	Persentase tersedianya sarpras pada UPT KPH	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		8 Unit		100 Persen	0	106,455,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	106,455,000	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												224,158,679	125,344,812		287,500,000		
320331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja		100 Persen	224,158,679	125,344,812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000	
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	626,455,000		626,455,000		
320355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Bengkalis Pulau	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		12 Lokasi		100 Persen	0	626,455,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	626,455,000	
3205	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												0	100,000,000		0		
32051	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												0	100,000,000		0		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 8 0 5 1 0 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 kegiatan		100 Persen	0	100,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
TOTAL												445,631,710	1,179,727,843			1,871,290,005		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
38183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	3 Unit	23 Unit	100 %	100 Persen	16,429,231	16,429,231	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,990,000	
38184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum			100 Persen	12 Bulan	24 OB	100 %	100 Persen	57,717,716	57,717,716	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	24,288,000	
3819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										7,340,000	7,340,000				5,692,500		
38191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	2 Unit	100 %	100 Persen	7,340,000	7,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,692,500	
383	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										1,174,813,253	1,619,246,673				852,974,200		
3833	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										1,174,813,253	996,272,473				230,000,000		
38331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	1,174,813,253	996,272,473	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	230,000,000	
3835	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										0	622,974,200				622,974,200		
38355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Mandau	Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		12 Lokasi		100 Persen	0	622,974,200	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	622,974,200	
TOTAL												1,364,532,840	1,807,505,010				1,488,818,860	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														1,413,209,409	2,163,004,408		1,837,567,103				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														191,743,505	170,397,505		171,594,950			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														94,032,913	72,686,913		108,133,350		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	980,000	980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,138,500	
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	35 Unit	100 %	100 Persen	22,645,281	22,645,281	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	11,385,000		
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	200 Porsi	193 porsi/box	100 %	100 Persen	4,488,000	4,488,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,175,000		
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	3 Jenis	100 %	100 Persen	5,113,632	5,113,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,882,250		
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kali	13 Kali	100 %	100 Persen	60,806,000	39,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	84,552,600		
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														67,506,592	67,506,592		34,251,600
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Surat	150 Surat	100 %	100 Persen	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,725,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
38183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	8 Unit	100 %	100 Persen	5,200,000	5,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	6,210,000
38184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	35 OB	100 %	100 Persen	60,806,592	60,806,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	26,316,600
3819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												30,204,000	30,204,000			29,210,000	
38191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 Persen	30,204,000	30,204,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	29,210,000
383	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												1,221,465,904	1,606,310,153			1,665,972,153	
3833	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												1,221,465,904	979,628,703			1,039,290,703	
38331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	100 Persen	1,221,465,904	979,628,703	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	1,039,290,703
3835	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	626,681,450			626,681,450	
38355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Rokan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha		2 Lokasi		100 Persen	100 Persen	0	626,681,450	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)		Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	626,681,450
385	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												0	150,000,000			0	
3851	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												0	150,000,000			0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 8 5 1 0 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/ pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 kegiatan		100 Persen	0	150,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
3 2 8 6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)										0	236,296,750		0			
3 2 8 6 1		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										0	236,296,750		0			
3 2 8 6 1 0 2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Persentase penurunan luasan lahan kritis	Jumlah Luasan (Ha)	Luas Rehabilitasi wilayah DAS/ Mangrove	Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Persen		32 Hektar		32 Ha	0	236,296,750		Persentase penurunan luasan lahan kritis	1 Persen	0	
TOTAL												1,413,209,409	2,163,004,408			2,355,067,103		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														423,389,501	1,472,913,566		1,348,690,000			
3	2 8	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														192,939,901	192,939,901		146,280,000		
3	2 8	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														28,339,249	28,339,249		34,379,814	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	120,000	120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	149,500	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Jenis	18 Unit	100 %	100 Persen	8,890,689	8,890,689	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	10,230,964	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	140 Porsi	140 porsi/box	100 %	100 Persen	2,296,000	2,296,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,656,500	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 Persen	1,782,560	1,782,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,677,850	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	5 Kali	5 Kali	100 %	100 Persen	15,250,000	15,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	19,665,000	
3	2 8	0 1	1.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														145,930,652	145,930,652		79,653,036
3	2 8	0 1	1.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	60 Surat	60 Surat	100 %	100 Persen	1,202,000	1,202,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,384,036	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	5 Unit	100 %	100 Persen	4,390,000	4,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,910,000	
320104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	36 OB	100 %	100 Persen	140,338,652	140,338,652	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	74,359,000	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												18,670,000	18,670,000			32,247,150	
320109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 Persen	18,670,000	18,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	32,247,150	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												230,449,600	943,676,915			1,202,410,000	
32031	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												0	193,940,000			193,940,000	
32031	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah unit	Persentase tersedianya sarpras pada UPT KPH	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha			7 Unit		100 Persen	0	193,940,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	193,940,000	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												230,449,600	178,766,915			287,500,000	
32033	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	100 Persen	230,449,600	178,766,915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000	
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	570,970,000			720,970,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320354	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		15 Lokasi		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	150,000,000	
320355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		3 Lokasi		100 Persen	0	570,970,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	570,970,000	
3205	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												0	100,000,000		0		
32051	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												0	100,000,000		0		
32052	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 Paket		100 Persen	0	100,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
3206	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												0	236,296,750		0		
32061	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												0	236,296,750		0		
32062	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Persentase penurunan luasan lahan kritis	Jumlah Luasan (Ha)	Luas Rehabilitasi wilayah DAS/ Mangrove	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Persen		32 Hektar		32 Ha	0	236,296,750		Persentase penurunan luasan lahan kritis	1 Persen	0	
TOTAL												423,389,501	1,472,913,566		1,866,190,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														428,886,962	968,719,602		1,187,219,200		
3	2 8	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														198,659,759	198,659,759		153,200,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														68,932,591	68,932,591		86,500,000
3	2 8	0 1	1.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,000,000
3	2 8	0 1	1.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	18 Jenis	18 Unit	100 %	100 Persen	17,740,691	17,740,691	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	20,405,600
3	2 8	0 1	1.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	180 Porsi	180 Porsi/Box	100 %	100 Persen	3,600,000	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,140,000
3	2 8	0 1	1.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10 Jenis	10 Jenis	100 %	100 Persen	1,175,900	1,175,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,000,000
3	2 8	0 1	1.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	5 Kali	5 Kali	100 %	100 Persen	45,616,000	45,616,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	55,954,400
3	2 8	0 1	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														97,377,168	97,377,168		28,750,000
3	2 8	0 1	1.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	60 Surat	60 Surat	100 %	100 Persen	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	3 Unit	100 %	100 Persen	1,950,000	1,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,300,000	
320104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	36 OB	100 %	100 Persen	94,427,168	94,427,168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	25,300,000	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												32,350,000	32,350,000			37,950,000	
320191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 Persen	32,350,000	32,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	37,950,000	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												230,227,203	770,059,843			1,034,019,200	
32031	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												0	0			150,000,000	
320313	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah unit	Persentase tersedianya sarpras pada UPT KPH	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 Unit		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	150,000,000	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												230,227,203	173,540,643			287,500,000	
320331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	230,227,203	173,540,643	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000	
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	596,519,200			596,519,200	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 8 0 3 1.0 0 5 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Kampar Kiri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		7 Lokasi		100 Persen	0	96,519,200	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	96,519,200	
3 2 8 0 3 1.0 0 5 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Kampar Kiri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		7 Lokasi		100 Persen	0	500,000,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	500,000,000	
TOTAL												428,886,962	968,719,602			1,704,719,200		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														352,395,282	905,415,337			1,281,678,000				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														176,765,367	161,669,367			182,320,000			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														77,978,455	62,882,455			120,681,150		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	900,000	900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,000,000		
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	19 Jenis	10 Unit	100 %	100 Persen	7,206,610	7,206,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	9,439,200			
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	360 Porsi	120 Porsi/Box	100 %	100 Persen	8,090,000	8,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	9,315,000			
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum		100 Persen	2 Jenis	2 Jenis	100 %	100 Persen	3,825,845	3,825,845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,399,250			
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kali	10 Kali	100 %	100 Persen	57,956,000	42,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	94,527,700			
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														87,786,912	87,786,912			43,355,000
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Surat	100 Surat	100 %	100 Persen	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,725,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
38183	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	15 Unit	100 %	100 Persen	8,795,016	8,795,016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	10,465,000
38184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	60 OB	100 %	100 Persen	77,491,896	77,491,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	31,165,000
3819	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												11,000,000	11,000,000			18,283,850	
38191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	3 Unit	100 %	100 Persen	11,000,000	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	18,283,850
383	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												175,629,915	743,745,970			1,099,358,000	
3833	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												175,629,915	144,387,970			230,000,000	
38331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	175,629,915	144,387,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	230,000,000
3834	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												0	0			170,000,000	
38346	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah batang	Persentase tersedianya bibit untuk penghijauan di UPT KPH Sorek	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		10000 Batang		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)		Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	170,000,000
3835	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	599,358,000			699,358,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 8 0 3 1.0 0 5 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Sorek	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		3 Lokasi		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	100,000,000	
3 2 8 0 3 1.0 0 5 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Sorek	Kab. Pelalawan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		5 Lokasi		100 Persen	0	599,358,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	599,358,000	
TOTAL												352,395,282	905,415,337			1,741,678,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														1,756,327,546	2,276,323,808		1,609,230,550				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														531,887,837	531,887,837		693,984,550			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														191,390,110	191,390,110		236,589,500		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	2,399,670	2,399,670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,760,000	
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Unit	186 Unit	100 %	100 Persen	14,819,718	14,819,718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	22,252,500		
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	107 Porsi	56 Porsi/Box	100 %	100 Persen	896,000	896,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,035,000		
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Jenis	50 Jenis	100 %	100 Persen	1,439,722	1,439,722	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,656,000		
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Kali	654 Kali	100 %	100 Persen	171,835,000	171,835,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	208,886,000		
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														276,102,727	276,102,727		382,875,050
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Surat	90 Surat	100 %	100 Persen	981,164	981,164	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TASIK BESAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Unit	100 %	100 Persen	25,599,600	25,599,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	8,625,000	
320104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	120 OB	100 %	100 Persen	249,521,963	249,521,963	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	373,100,050	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												64,395,000	64,395,000			74,520,000	
320191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	11 Unit	100 %	100 Persen	64,395,000	64,395,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	74,520,000	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												1,224,439,709	1,744,435,971			915,246,000	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												1,224,439,709	1,116,689,971			287,500,000	
320331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha		1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	1,224,439,709	1,116,689,971	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000	
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	627,746,000			627,746,000	
320355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Tasik Besar Serkap	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha			4 Lokasi		100 Persen	0	627,746,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	627,746,000	
TOTAL													1,756,327,546	2,276,323,808			2,529,230,550	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3																					
3	28																				
3	28	01																			
3	28	01	1.06																		
3	28	01	01	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	2,144,916	2,144,916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,467,325
3	28	01	02	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	18 Jenis	20 Unit	100 %	100 Persen	9,153,638	9,153,638	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	10,531,700
3	28	01	04	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	120 Porsi	120 Porsi/Box	100 %	100 Persen	1,792,000	1,792,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,070,000
3	28	01	05	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Jenis	8 Jenis	100 %	100 Persen	4,490,357	4,490,357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	5,164,650
3	28	01	09	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10 Kali	30 Kali	100 %	100 Persen	81,558,000	64,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	106,041,500
3	28	01	1.08																		
3	28	01	01	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	110 Surat	100 Surat	100 %	100 Persen	999,000	999,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
32010103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		12 Bulan	15 Unit	100 %	100 Persen	6,980,000	6,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	8,050,000
32010104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		12 Bulan	48 OB	100 %	100 Persen	124,668,100	124,668,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	56,114,825
32010109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											34,810,000	34,810,000			29,900,000		
32010109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen		1 Unit	3 Unit	100 %	100 Persen	34,810,000	34,810,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	29,900,000
320103	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											225,225,000	938,079,700			1,154,347,200		
320103	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi											0	96,519,200			96,519,200		
320103	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah dokumen	Persentase tersedianya dokumen RPHJP pada UPT KPH	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha			1 Dokumen		100 Persen	0	96,519,200	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	96,519,200
320103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung											225,225,000	171,232,500			287,500,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
32031001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	225,225,000	171,232,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000			
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												670,328,000			770,328,000				
320354	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Tebing Tinggi	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		8 Lokasi		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	100,000,000			
320355	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Tebing Tinggi	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		5 Lokasi		100 Persen	0	670,328,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	670,328,000			
3204	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA											0	1,202,058,000			0				
32043	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											0	1,202,058,000			0				
320434	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Terehabilitasinya kawasan mangrove	Luasan penanaman/pemeliharaan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		72 Hektar		72 Hektar	0	1,202,058,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0			
3205	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											0	150,000,000			0				
32051	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											0	150,000,000			0				
320512	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 kegiatan		100 Persen	0	150,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0			
TOTAL												491,821,011	2,539,555,711			1,979,587,200				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
3	2 8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	489,759,527	1,602,599,353		1,516,670,448	
3	2 8	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																	262,759,516	262,759,516		323,790,850	
3	2 8	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	172,887,420	172,887,420		205,439,680
3	2 8	0 1	1.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera- ngan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	835,000	835,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	9,257,500	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	6 Unit	21 Unit	100 %	100 Persen	64,863,770	64,863,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	60,950,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	120 Porsi	90 porsi/box	100 %	100 Persen	2,700,000	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,105,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	4 Jenis	8 Jenis	100 %	100 Persen	3,192,650	3,192,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,672,180	
3	2 8	0 1	1.0 6	0 9	Penyelenggar- aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			100 Persen	10 Kali	32 Kali	100 %	100 Persen	101,296,000	101,296,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	128,455,000	
3	2 8	0 1	1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	0	0		50,000,000
3	2 8	0 1	1.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit		Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Unit				0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)				50,000,000	
3	2 8	0 1	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	56,312,096	56,312,096		31,263,670

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
32010801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	110 Surat	90 Surat	100 %	100 Persen	990,000	990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000	
32010803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 Persen	2,800,000	2,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	3,450,000	
32010804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	24 OB	100 %	100 Persen	52,522,096	52,522,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	26,663,670	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												33,560,000	33,560,000				37,087,500
32010901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 %	100 Persen	33,560,000	33,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	37,087,500	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												227,000,011	1,039,839,837				1,192,879,598
320301	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												0	141,940,000				141,940,000
32030103	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah unit	Persentase tersedianya sarpras pada UPT KPH	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 Unit		100 Persen	0	141,940,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	141,940,000	
320303	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												227,000,011	134,460,239				287,500,000
32030301	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	227,000,011	134,460,239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	287,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 8 3 5	1.0 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi											0	763,439,598				763,439,598
3 8 3 5	1.0 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Mandah	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		10 Lokasi		100 Persen	0	763,439,598	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	763,439,598
3 8 5	0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											0	300,000,000				0
3 8 5 1	1.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											0	300,000,000				0
3 8 5 1 2	1.0 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700000 Ha		3 Paket		100 Persen	0	300,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
TOTAL												489,759,527	1,602,599,353				2,120,420,448	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3	2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														363,168,644	1,102,176,188		1,327,353,700		
3	2 8	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														181,708,851	157,656,851		189,152,000	
3	2 8	0 1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah														95,569,595	71,517,595		130,246,930
3	2 8	0 1	1.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	2 Jenis	100 %	100 Persen	1,265,000	1,265,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	12,006,000
3	2 8	0 1	1.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	13 3 Jenis	13 Unit	100 %	100 Persen	7,012,961	7,012,961	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	6,700,130
3	2 8	0 1	1.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	160 Porsi	170 Porsi/Box	100 %	100 Persen	3,840,000	3,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,416,000
3	2 8	0 1	1.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	4 Jenis	8 Jenis	100 %	100 Persen	6,749,634	6,749,634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	7,762,500
3	2 8	0 1	1.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	10 Kali	10 Kali	100 %	100 Persen	76,702,000	52,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	99,362,300
3	2 8	0 1	1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														64,520,856	64,520,856		34,043,910
3	2 8	0 1	1.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	110 Surat	100 Surat	100 %	100 Persen	995,000	995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,150,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	10 Unit	100 %	100 Persen	6,580,000	6,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 Persen	7,590,000	
320104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	24 OB	100 %	100 Persen	56,945,856	56,945,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	25,303,910	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												21,618,400	21,618,400			24,861,160	
320109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	2 Unit	100 %	100 Persen	21,618,400	21,618,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	24,861,160	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												181,459,793	944,519,337			1,138,201,700	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												181,459,793	136,317,637			230,000,000	
320331	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	181,459,793	136,317,637	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	230,000,000	
32034	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												0	0			100,000,000	
320346	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah batang	Persentase tersedianya bibit untuk penghijauan di UPT KPH Indragiri	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		15000 Batang		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	100,000,000	
32035	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	808,201,700			808,201,700	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3 2 8 3 5 1.0 0 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Indragiri	Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		30 Lokasi		100 Persen	0	808,201,700	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	808,201,700	
TOTAL												363,168,644	1,102,176,188			1,787,353,700		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN														368,758,631	1,269,954,007		1,331,733,200				
3	2	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														188,033,744	188,033,744		182,924,000			
3	2	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah														90,289,488	90,289,488		116,946,200		
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 bulan	12 bulan	100 %	100 Persen	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,500,000	
3	2	0	1.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Jenis	20 Unit	100 %	100 Persen	6,497,053	6,497,053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	6,679,200		
3	2	0	1.0	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	196 Porsi	196 porsi/box	100 %	100 Persen	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	4,657,500		
3	2	0	1.0	0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Jenis	1 Jenis	100 %	100 Persen	554,435	554,435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	638,250		
3	2	0	1.0	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Kali	20 Kali	100 %	100 Persen	78,238,000	78,238,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	103,471,250		
3	2	0	1.0	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														86,751,256	86,751,256		53,327,800
3	2	0	1.0	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	110 Surat	10 Surat	100 %	100 Persen	1,595,000	1,595,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	1,876,800		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
320103	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpenuhinya Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	3 Unit	100 %	100 Persen	2,070,000	2,070,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	2,875,000	
320104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	12 Bulan	60 OB	100 %	100 Persen	83,086,256	83,086,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	48,576,000	
320109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												10,993,000	10,993,000			12,650,000	
320191	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Persen	1 Unit	2 Unit	100 %	100 Persen	10,993,000	10,993,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	12,650,000	
3203	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												180,724,887	881,920,263			1,148,809,200	
32031	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi												0	197,989,200			197,989,200	
320311	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah dokumen	Persentase tersedianya dokumen RPHJP pada UPT KPH	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		1 Dokumen		100 Persen	0	96,519,200	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	96,519,200	
320313	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah unit	Persentase tersedianya dokumen RPHJP pada UPT KPH	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		10 Unit		100 Persen	0	101,470,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	101,470,000	
32033	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung												180,724,887	113,111,063			230,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3201031	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Persentase tersedianya data dan informasi pemanfaatan hutan di Wilayah Kerja UPT KPH	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha	1 Dokumen	1 Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	100 Persen	180,724,887	113,111,063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	230,000,000	
320104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara												0			150,000,000		
320106	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah batang	Persentase tersedianya bibit untuk penghijauan UPT KPH Singingi	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		20000 Batang		100 Persen	0	0	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	150,000,000	
320105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi												0	570,820,000		570,820,000		
320105	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Jumlah lokasi	Persentase terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi di UPT KPH Singingi	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		10 Lokasi		100 Persen	0	570,820,000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	570,820,000	
320105	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												0	200,000,000		0		
320101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan												0	200,000,000		0		
320102	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Produktif	Persentase terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat/ pokmas/ KTH/ Badan Usaha dan atau Kegiatan	Kab. Kuantan Singingi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		700000 Ha		2 kegiatan		100 Persen	0	200,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700000 Ha	0	
TOTAL												368,758,631	1,269,954,007			1,791,733,200		

BAB IV PENUTUP

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau masih mengalami kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik masalah pelaksanaan kegiatan secara umum di lapangan, penyesuaian sistem pencairan non tunai, maupun minimnya pagu anggaran untuk pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Secara umum permasalahan yang masih terus diupayakan perbaikannya pada urusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diantaranya: tingginya tingkat pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah B3 yang belum optimal, konflik tenurial dan perambahan kawasan hutan, Illegal Logging, kebakaran hutan dan lahan, serta luasnya lahan kritis. Solusi untuk permasalahan tersebut antara lain: Meningkatkan pengawasan izin usaha/kegiatan yang limbahnya berpotensi sebagai sumber pencemar, melakukan percepatan penataan batas kawasan hutan dan areal kerja Izin Kehutanan, meningkatkan penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama masyarakat setempat, meningkatkan program Perhutanan Sosial, serta mendorong peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan termasuk kawasan mangrove yang dilakukan oleh multi pihak (pemerintah, perusahaan, NGO, LSM, kelompok masyarakat, dll).

Diharapkan dengan dukungan seluruh *stakeholder*, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dapat optimal mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Riau pada umumnya dan target kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau khususnya.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini mengikat secara kelembagaan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan serta anggaran pada tahun 2021 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019–2024, kemudian mempedomani hasil pemetaan program kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renja PD Tahun 2021 ini juga memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021, termasuk memuat permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2021 “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berkomitmen penuh untuk mendukung dan melaksanakannya sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah melalui program kegiatan yang telah tertuang dalam perubahan Renja PD Tahun 2021 ini.

Rencana tindak lanjut Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan indikator dan target program, kegiatan dan sub kegiatan dan akan dimaksimalkan pencapaiannya hingga akhir TA. 2021 sehingga diharapkan target kinerja utama Dinas LHK Provinsi Riau dapat dicapai sesuai rencana.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau akan melaporkan hasil perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dari hasil evaluasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pekanbaru, September 2021

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**



MAMUN MUROL

Pembina Utama Madya

NIP. 19660610 199203 1 008